

**HUKUM ISLAM TENTANG UPAH KULI ANGKUT**  
**(Studi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat**  
**Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**PUSPITA SARI**

**NPM : 1521030104**

**Program Studi : Muamalah**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**TAHUN 1440 H/2019 M**

**HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH KULI ANGKUT**

**(Studi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat**

**Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**PUSPITA SARI**

**NPM : 1521030104**

**Program Studi : Muamalah**

Pembimbing I : DRA.Firdaweri,M.H.I.

Pembimbing II: Hj.Linda Firdawaty,S.Ag.,M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

## ABSTRAK

Penetapan upah didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak pada kebutuhan hidup, dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak jasa kuli angkut dengan pihak pemilik barang sama-sama sepakat dengan ketentuan yang dibuat. Namun di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung terdapat kuli angkut, diantara kuli angkut ada yang mendapatkan upah tidak sesuai dengan akad perjanjian. Islam mengajarkan bahwa dalam upah mengupah harus sesuai dengan perjanjian di awal, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 1 bahwa seseorang harus memenuhi Aqad-aqad, oleh sebab itu peristiwa yang terjadi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung dengan ajaran Islam terdapat kesengajaan yang harus ditentukan hukum Islamnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tentang praktik upah kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung dan bagaimana hukum Islam tentang mengenai pelaksanaan upah kuli angkut yang terjadi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mungkin praktik upah kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung dan untuk mengetahui sejauh mungkin hukum Islam tentang mengenai pelaksanaan upah kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini merupakan *Field research* dengan studi yang dilakukan di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari buruh kuli angkut dan pemilik barang tersebut dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis data adalah kualitatif. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 5 orang sebagai kuli angkut dan 5 sebagai pemilik barang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Sistem pelaksanaan pembayaran upah mengupah terhadap buruh kuli angkut barang yang terjadi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung dilakukan antara mu'ajir dan musta'jir dengan cara pembayaran upahnya diberikan pada akhir pekerjaan dengan kesepakatan di awal adapun besaran biaya bersekitaran antara Rp.5.000 sampai dengan Rp.15.000 serta dilihat berdasarkan besar dan ringannya barang. Namun dengan demikian ada sebagian kuli yang memaksakan pembayaran di luar kesepakatan yang dibuat.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puspita Sari  
NPM : 1521030104  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Sistem Pemberian Upah Kuli Angkut Studi Kasus di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung” adalah benar-bener merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2019  
Penulis

  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
Puspita Sari

1521030104





**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudara:

Nama **PUSPITA SARI**

NPM **1521030104**

Jurusan **Mu'amalah**


Fakultas **Syari'ah**

Judul **PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG  
SISTEM UPAH KULI ANGKUT (Studi Kasus di  
Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar  
Lampung )**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dra. Firdaweri, M.H.I**  
**NIP. 195509191982032004**

**Pembimbing II**

  
**Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197112041997032001**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**



**Khairuddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





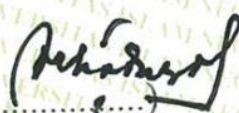
**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**


**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**


**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut (Studi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung)”** disusun oleh Puspita Sari, NPM. 1521030104, Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 23 September 2019.

**Tim Penguji**

Ketua : Drs.H.Chaidir Nasution, M.H. (.....) 

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag (.....) 

Penguji Utama : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....) 

Penguji Pendamping I : Dra.Firdaweri, M.H.I (.....) 

Penguji Pendamping II : Hj.Linda Firdawaty,S.Ag.,M.H (.....) 



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Drs.H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002** 

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbi'alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasih-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini, Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku Bapak Ruzaini dan Ibu Halelah yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang do'a dan motivasi Bapak dan Ibu yang selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan. Ku ucapkan terimakasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu. Kakakku Tersayang Muhammad Jayadi, Taufan Irawan, Rosna Wati, Erna Wati, Pidia Wati, adek Tercinta Aspahani, dan Keponakan Raffa Maulana, Erlitha Arsifa Salsabila, dan Vira Lutvia yang selalu memberikan do'a dan dukungan, serta menjadi pelipur hati. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan studi dengan baik. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Puspita Sari, dilahirkan pada tanggal 15 Januari 1998 di Desa Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, merupakan anak ke lima dari enam bersaudara, buah perkawinan dari Bapak Ruzaini dan Ibu Halelah, pendidikan di mulai dari SDN 2 Sumur Putri Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2009, SMP NEGERI 9 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012, SMA NEGERI 7 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015, dan mengikuti strata 1 program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan dan selesai pada tahun 2019.

Bandar Lampung,  
Penulis

Puspita Sari  
1521030104





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman. Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat-Nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul **Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut**. Skripsi ini disusun untuk salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dijumpai kebenarannya maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena tidak kesengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Moh.Mukri,M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang membangun dan mengembangkan UIN Raden Intan Lampung Sehingga menjadi seperti yang sekarang
2. Bapak Dr. KH. Khiruddin, M. H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin. M.S.I., selaku ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dra.Firdaweri, M.H.I., selaku pembimbing I, dan Ibu Linda Firdawaty,S.Ag.,M.H., selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada orang tua saya, kakak-kakak dan sahabat-sababat terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semoga Allah Senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Teman-teman mahasiswa Jurusan Muamalah Ekonomi Syariah Angkatan 2015 UIN Raden Intan Lampung, yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat yang kalian berikan.

8. Teman-teman KKN UIN Raden Intan Lampung Kelompok 153 yang tidak disebutkan satu persatu terimakasih atas persahabatan selama ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar lampung, Agustus 2019  
Penyusun

Puspita Sari  
Npm 1521030104



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
G. Signifikasi Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian.....	9

### BAB II BEBERAPA ASPEK MENGENAI AKAD DAN UPAH

A. Beberapa Aspek Mengenai Akad	
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Islam .....	15
2. Rukun dan Syarat akad.....	21
3. Macam-macam Akad.....	25
4. Akibat Hukum Akad.....	28
B. Beberapa Aspek Al-Ijarah/Upah-Mengupah	
1. Pengertian Dan Hukum Upah .....	28
2. Rukun dan Syarat Upah .....	40
3. Macam-macamUpah.....	49
4. Hak Penerima Upah .....	52
5. Sistem Pengupahan.....	54
6. Hubungan Kerja.....	57
7. Bentuk Upah .....	58

### BAB III LAPORAN PENELITIAN/ HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung .....	61
B. Sistem Upah Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung .....	65



#### **BAB IV ANALISA DATA**

- A. Sistem Upah Pada Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung ..... 73
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung ..... 75

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 81
- B. Rekomendasi ..... 81

#### **DAFTAR PUSTAKA** **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran : Panduan dan Hasil Wawancara



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun proposal ini berjudul “**Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut (Studi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung)**”.

Adapun istilah yang perlu diuraikan dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah kumpulan daya upaya para ahli Hukum untuk menetapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup> Hukum Islam disini lebih spesifik pada Hukum Islam yang mengatur tentang keadaan antar manusia yakni Fiqh Muamalah. Hukum Islam pula dinamakan fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional.<sup>2</sup> Dari uraian-uraian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam mencakup berbagai persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia

---

<sup>1</sup> M. Hasbi Assidiqy, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Riski, 2002), h. 41.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 3.

maupun urusan akhirat. Jadi yang dimaksud dengan perspektif hukum Islam adalah yang mengatur keadaan antara hubungan manusia dengan manusia.

2. Upah kuli angkut secara istilah *Ijarah* akad permindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *Ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>3</sup> Jadi sistem upah kuli angkut adalah upah yang diberikan di akhir pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan akad perjanjian di awal.
3. Kuli angkut adalah orang yang berkerja dengan mengandalkan kekuatan fisiknya, seperti untuk membakar muatan atau mengangkut barang-barang dari stasiun, dengan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain digunakan untuk menyebut kuli sebagai pekerja kasar. Jadi yang dimaksud dengan kuli angkut adalah seseorang yang membawa barang yang sampai tujuan.
4. Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung adalah Stasiun Kereta Api dimana tempat para penumpang yang naik-turun dalam memakai sarana transportasi kereta, selain stasiun pada masa lalu dikenal juga dengan halte kereta api yang memiliki fungsi nyaris sama dengan stasiun kereta api. Jadi yang dimaksud stasiun kereta api Tanjung Karang adalah tempat kereta api berangkat dan berhenti

---

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011, hal.387



untuk melayani naik dan turunnya penumpang dan bongkar muatan barang atau keperluan operasi kereta api.

Uraian di atas, maka maksud dalam judul ini adalah Hukum Islam Tentang Ketenaga kerjaan Upah Kuli Angkut Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut :

### **1. Alasan Objektif**

- a. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan salah satu masalah praktik muamalah yang kerja didalam kehidupan masyarakat.
- b. Mengingat sangat banyak kebutuhan manusia sekarang ini yang berkembang pesat maka banyak pula persoalan yang terjadi didalam muamalah sehingga perlu memahami benar sistem bermuamalah pada zaman sekarang ini, lebih spesifiknya menyerahkan Upah Mengupah dalam Jasa yang diberikan oleh orang.

### **2. Alasan Subjektif.**

- a. Pembahasan judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

b. Referensi yang terkait didalam penelitian ini cukup menunjang sehingga dapat mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



### C. Latar Belakang Masalah

Upah kuli angkut di Stasiun kereta api Tanjung Karang Bandar Lampung, pada umum pembayaran kereta api Tanjung Karang pembayaran secara sukarela tergantung dengan hati dan rezeki para kuli angkut.

Semakin berkembangnya zaman sekarang banyak sekali masalah yang terjadi dibidang muamalah, salah satu contohnya adalah soal upah-mengupah. Semakin banyaknya kebutuhan manusia maka semakin banyak pula uang yang dikeluarkan, Berbagai-macam usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan keberadaan Stasiun Kereta Api pun dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat dari orang tua, dewasa hingga anak-anak untuk mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemandangan yang sudah biasa ketika melihat stasiun kereta api dan tempat-tempat seperti pasar-pasar tradisional dimanfaatkan sebagian orang untuk berjualan, mengamen, mengemis, dan memberikan jasa kuli angkut barang.

Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus menjadi adat sepanjang tidak mengganggu stasiun, pasar-pasar tradisional dan biasanya setelah mereka memberikan jasa mereka mendapatkan upah yang dalam fiqh disebut dengan *Ijarah*.

Dalam kerja kuli angkut hanya menggunakan tenaga dan alat bantu seperti alat dorong untuk barang yang lebih besar untuk membantu mereka mengangkut barang-barang tersebut. Mereka tidak mendapatkan upah yang tetap tergantung pada orang menggunakan jasa kuli angkut tersebut itu memberikan uang berapa kepada mereka. Biasanya mereka diberi uang



kisaran Rp.5.000 sampai dengan Rp.15.000 dan tergantung besar atau kecilnya barang atau berat dan ringan barang tersebut. Setiap hari orang yang bekerja mengangkut barang ini tidak mendapatkan uang yang tetap perhari nya, terkadang mereka hanya mendapatkan Rp.50.000 dalam sehari. Demi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mencari sesuap makan mereka lakukan pekerjaan mengangkut barang ini setiap hari nya. Tanpa adanya akad kesepakatan dari awal tentang upah kuli angkut terkadang para kuli angkut merasa mendumel didalam hati tidak seimbang dengan upah yang telah diberikan oleh yang mempunyai barang, tetapi para kuli angkut pasrah saja untuk menerima upah yang diberikan kepada walaupun tidak seimbang dengan tenaga.

Salah satu tujuan manusia mencari uang adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan berbagai usaha setiap manusia melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Untuk itu sering kali manusia melakukan usaha yang mereka ciptakan sendiri agar menghasilkan uang dengan usaha yang mereka melakukan tersebut.

Keberadaan stasiun kereta api dan tempat-tempat pasar pun mereka gunakan untuk mencari sumber penghasilan uang, seperti ada yang berjualan makanan, koran, bahkan ada pula yang memberikan jasa untuk mengangkut barang-barang di Stasiun Kereta Api.

Jasa merupakan perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi.<sup>4</sup> Di dalam buku Idris Ahmad yang berjudul *Fiqh Syafi'i*, ia berpendapat bahwa *Ijarah* berarti upah-mengupah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabis menjelaskan makna *Ijarah* dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan kata *Ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga.<sup>5</sup>

Di dalam Hukum Islam, telah dijelaskan syarat sahnya *Ijarah* dalam hal upah-mengupah yaitu harus adanya keridhaan dari kedua belah pihak, dan bermanfaat dengan jelas yang dimaksud bermanfaat

Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S An-Nisa' (4): 29)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 569.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-6 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 113.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kepada hambanya di muka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.

Pekerjaan kuli angkut barang ini pada dasarnya masuk ke dalam prinsip *Ijarah*. Prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objeknya barang, sedangkan pada *Ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta untuk lebih mengetahui praktik kuli angkut barang di stasiun kereta api tanjung karang. Oleh karena itu peneliti menuangkan kedalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul: **“Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut ( Studi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung)”**.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih mengarahkan pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan

---

<sup>6</sup>Ghufron A.mas,adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet.pertama,(Jakarta: Raja Persada Grafindo, Cet I, 2002), h. 75.



pelaksanaan sistem pengupahan dengan adanya upah yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal pada pekerja kuli angkut. Karena ada kepentingan dari masalah pada pengupahan, penelitian akan difokuskan pada “ Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung”



## **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pemberian Upah Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?
2. Bagaimana Hukum Islam tentang Pelaksanaan Upah Kuli Angkut yang terjadi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui Praktik Pemberian Upah Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?
  - b. Untuk mengetahui Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?
2. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan dari penelitian adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan untuk memberikan wawasan bagi penulisan dan pemahaman bagi masyarakat tentang upah dalam pandangan Hukum Islam
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



## G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlihat dalam pelaksanaan upah yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal pada pekerja kuli angkut, serta mampu memberikan pemahaman mengenai pelaksanaanya sesuai dengan hukum Islam.
- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang melakukan atau tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>7</sup> Dalam hal ini akan langsung mengamati. Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun

---

<sup>7</sup>Susiadi AS, *Meteologi Penelitian*, (Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.



laporan hasil penelitian terdahulu<sup>8</sup>, yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.



---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 9.

#### b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai pemberian upah kuli angkut di Stasiun Kereta Api ditinjau dari perspektif hukum islam.

### **2. Data dan Sumber Data**

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan Hukum jasa yang terkait tentang objek dan subjek pada kuli angkut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pelaku jasa yaitu orang yang berprofesi sebagai kuli angkut barang di stasiun kereta api, data yang dikumpulkan dari bulan April sampai dengan bulan Juli sampai september Tahun 2019.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini

### **3. Populasi**

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah pelaku jasa kuli angkut barang yaitu 5 orang dan 5 pengunjung stasiun kereta api yang akan peneliti wawancarai tersebut.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

##### **a. Interview**

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini: Teknik wawancara berstruktur, yaitu dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada orang yang kuli angkut barang untuk mengetahui bagaimana praktik dari jasa pemberian upah kepada kuli angkut yang selanjutnya akan dilihat dari Tinjauan dari prespektif hukum Islam.

##### **b. Observasi**

Observasia adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>9</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>10</sup> Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 114.

<sup>10</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), h. 48.





#### b. Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data atau *coding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

#### c. Sistematika Data (*systemating*)

Sistematika data atau *systemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>11</sup>

### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan dari perspektif. Akan dikaji menggunakan metode *kualitatif*. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bentuk jasa serta praktek jasa dalam kuli angkut. Tujuannya dapat dilihat dari sudut Hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jasa dalam tinjauan Hukum Islam.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala

---

<sup>11</sup> Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan  
yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki



## BAB II

### BEBERAPA ASPEK MENGENAI AKAD DAN UPAH

#### A. Teori Akad Dalam Islam

##### 1. Pengertian dan Dasar hukum Islam

###### a. Pengertian Akad

Secara etimologi (bahasa), kata akad berasal dari kata *Al-'Aqd* yang mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali), menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>12</sup> Akad yaitu ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi. Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan.<sup>13</sup> Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syari'ah.<sup>14</sup>

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

1. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu : mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai potongan benda.
2. Sambungan (*Aqdatm*), yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.52

<sup>2</sup> Rozalinda, *Hukum Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.45.

<sup>3</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.35



3. Janji (*al-ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam al-Qur'an Sunah Imran (3):76)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

*“Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa”(Q.S. Al-Imran 3:76 ).<sup>15</sup>*

Istilah ahdu dalam al-Qur'an men yang tidak ada sangkutan mengacu pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkutan pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Ali-Imran ayat :76, bahwa janji tetap mengikat orang membantunya.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Sunah Al-maidah (5) : 1 yakni :

---

<sup>15</sup>Prof.H.Mahmud Junus,*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, (Jakarta: PT: Alma'arif 1989), h. 54

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا

مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ



*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

(Q.S Al-Maidah : 1)<sup>16</sup>

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyari'atkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Prof.H.Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, (Jakarta: PT: Alma'arif 1989),h.97

<sup>17</sup> Abdullah al-Mushlih dan shalah Ash-Shawi,*Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq,2008),h.26

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab dan qabul dalam lingkup disyaratkan dan berpengaruh dalam sesuatu. Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah “pertempuran ijab dan qabul sebagai kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.” Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa’, dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk meningkatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan keinginan masing-masing ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama disebut *mu’jib* dan (pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*.

Pengertian akad istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus, akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, akad adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti *waqaf*, pembebasan, *thalaq*, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *Ijarah*, *Wakalah*, dan *rahn*.

Pengertian akad dalam makna khusus, akad yaitu ikatan antara *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang disyari'atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya. Memberikan pengaruh pada definisi diatas maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dngan demikian, akad merupakan ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat huku terhadap objek yang diakadkan.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut para ahli, akad di didefinisikan sebagai berikut:

a. Muhammad Aziz Hakim

Mengemukakan bahwa akad merupakan gabungan atau penyatuan dari penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang sah sesuai dengan hukum islam. *Ijab* adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.<sup>19</sup>

b. Ghufroon A.Mas'adi

Mengemukakan bahwa akad merupakan menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang

---

<sup>18</sup> Rozalinda, *Op.Cit*,h.46

<sup>19</sup> Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam*, Pustaka Hidayah, Jakarta, 1996, h.192.



lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu dan kokoh.<sup>20</sup>

c. Hasbi Ash-Shiddieqy

Mengumpulkan bahwa akad merupakan perikatan antara Ijab dengan qabul secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>21</sup>

d. Zainal Abdulhaq

Mengemukakan bahwa akad merupakan suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syar'i.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat dipahami bahwa akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang mengunci antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap suatu transaksi yang dibenarkan oleh syar'i yang meliputi subjek atau pihak-pihak, objek dan ijab qabul.

**b. Dasar Hukum Islam**

Adapun diantara dasar-dasar hukum akad adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah(5) ayat 1, yakni:

---

<sup>20</sup> Ghufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konteksual*, Cet-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, h.192.

<sup>21</sup> T.M.Hasbi Ash-Shaddieqy, *Pengantar Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta,1992, h.21.

<sup>22</sup> Zainal Abdullhaq, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Amani, Jakarta,2002,h.76 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“ Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad itu.....”<sup>23</sup>

Maksud akad merupakan bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal. Dan kalimat tersebut adalah merupakan asas ‘*uqud*’.<sup>24</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa patuhilah aqad perjanjian yang dilakukannya. Pemilik barang harus setia pada isi perjanjian dengan para kuli angkut, dan perjanjian harus memenuhi dengan hukum Islam, jadi memenuhi perjanjian adalah wajib.

## 2. Rukun dansyaratakad

Ada beberapa akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in’iqad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*) dapat dijelaskan sebagai berikut

---

<sup>23</sup>Prof.H.Mahmud Junus,*Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan*, (Jakarta:PT:Alma’arif 1989),h.97

<sup>24</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraqhi,*Tafsir Al-Maraqhl Jus IV*, Penerjemahan Bahrn Abu Bakar dkk, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.81.

## 1. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang di wujudkan oleh akad, rukun-rukunnya ialah sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad orang yang memiliki hak.<sup>25</sup> Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi *aqid*, antara lain:

- 1) *Ahliyah* keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayiz dan berakal. Berakal yang dimaksud disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara berbahaya dan tidak dan antara merugikan dan menguntungkan.
- 2) Wilayah yang dimaksud dengan wilayah sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), H.68.

wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

- b. *Ma'qud* adalah benda yang diakadkan seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, dalam gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad tersebut.
- d. *Sighatal-aqd* yaitu ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sight al-aqd* ialah:<sup>26</sup>

- a. *Sighatal-aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian.
- b. Harus sesuai antara ijab qabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz.
- c. Mengambarkan kesungguhan. Kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau

---

<sup>26</sup> Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43.

ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tġjarah harus saling ridho.<sup>27</sup>

## 2. Syarat akad

Syarat akad dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

### a. Syarat terbentuknya akad (syurut *al-in- 'iqad*)<sup>28</sup>

Masing-masing rukun atau unsur yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat yang dimaksud dinamakan syarat terbentuknya akad.

Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad,yaitu:

- 1) Tamyiz
- 2) Terbilang (*at-ta 'addud*)

Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat akad, yaitu:

- 1) Adanya penyesuaian ijab qabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat.
- 2) Kesatuan majelis akad

Rukun akad ketiga yaitu objek akad harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Objek itu dapat diserahkan

---

<sup>27</sup>*ibid.*,h. 44.

<sup>28</sup>*ibid.*,h. 99.



2) Tertentu atau dapat ditentukan

3) Objeknya dapat ditransaksikan

d. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuris syar'i namun belum serta merta sah. Untuk mengetahui sahnya akad, rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyeempurna ini disebut keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku kebanyakan akad dan syarat keabsahan khusus yang berlaku pada masing-masing berbagai macam akad khusus.

e. Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-nafadz*)<sup>29</sup>

Apabila memenuhi rukun dan syarat dan syarat terbentuk syarat-syarat keabsahan maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi meskipun sudah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut akad maukuf (terhenti atau tergantung). Untuk dilaksanakan akibat hukumnya, akad sudah sah itu harus memenuhi dua syarat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 101.

berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang harus dilakukan.

f. Syarat mengikatnya akad (*syarhul luzum*)<sup>30</sup>

Pada dasarnya apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syaratnya maka akad tersebut sudah dapat dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak. Maka tidak boleh salah satu menariknya kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Sebenarnya akad harus dikhususkan untuknya beberapa syarat atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat *idla'fiyah* (syarat-syarat tambahan) yang harus ada disamping syarat umum seperti syarat adanya saksi untuk terjadinya nika, dan seperti tidak boleh adanya ta'liq dalam aqad *mua'awadlah* dan aqad *tamalik* seperti jual beli dan hibah, ini merupakan syarat *idla'fiyah*.

### 3. Macam-macam Akad

a. Beberapa sifat akad secara syariat, terbagi menjadi 2 yaitu:

1. *Aqad Shahih*

Yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya menurut syariat yang berlaku akibat hukum yang timbulkan oleh akad dan

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 104.

mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad.<sup>31</sup> Pengertian lain *aqad shahih* adalah setiap akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. *Aqad Shahih* menurut hanafiyah dan malikiyah terbagi menjadi kepala :

*Nafiz* yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. *Aqad Nafiz* terbagi kepada:

- a. *Aqad lazim* yaitu tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang berakad tanpa kerelaan pihak lain atau akad yang mengikat para pihak yang berakad, seperti akad jual-beli dan *Ijarah* (sewa-menyewa dan upah-mengeupah). Ghairu lazim yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang berakad saja tanpa harus ada kerelaan pihak lain. Akad ini adalah akad yang tidak mengikat para pihak-pihak sehingga dibatalkan secara sepihak oleh salah seorang yang berakad tanpa harus meminta kerelaan pihak lain. Misalnya akad, *wakalah*, *ariyah*, dan *wadi'ah*.
- b. *Aqad mauquf* adalah akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*. Akad ini bisa

---

<sup>31</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.10

berakibat hukum apabila ada keizinan walinya, jika tidak ada izin wali maka akad itu batal, ini merupakan pendapat hanafiyah. Namun, akad ini batal menurut pendapat Syafi'iyah dan Hambali.

## 2. *Aqad ghairu shahih*

Merupakan sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun dan syarat), seperti jual beli bangkai. Dengan demikian akad berdampak hukum tidak sah. Menurut Jumhur Ulama terhadap akad itu tidak memberikan pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak. Sementara itu, Ulama Hanafiyah membagi *aqad ghairu shahih* menjadi 2, yaitu :

- a. *Aqad batil* merupakan akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti salah orang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan merupakan *mal ghairu mutaqawwin* seperti *khamar*. Terhadap Aqad batil, apa pun yang diakadkan dianggap tidak pernah terjadi, dan tidak menimbulkan implikasi hukum terhadap objek akad dan para pihak yang melakukan akad, karena akadnya dipandang tidak ada. Inilah yang dikatakan dalam hukum positif dengan batal demi hukum.
- b. *Aqad fasid* merupakan akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud. Terhadap *Aqad fasid* wajib difasikhkan, baik oleh salah seorang dari

dua orang yang berakad, maupun oleh hakim karena akad tersebut terlarang secara Syar'i.

3. Menurut Berhubungannya Pengaruh Akad, terbagi menjadi 3, yaitu :

- a. *Aqad munajaz* merupakan akad yang bersumber dari *Shigat* yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum selama terpenuhi rukun dan syaratnya, seperti :“Saya jual tanah ini kepada engkau seharga sekian” yang berlangsung diterima oleh pihak lain.
- b. Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang merupakan akad yang bersumber pada *Shigat* yang ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum bila batasan waktu tiba 1, seperti :“Saya akan menyewakan rumah ini kepada kamu selama setahun pada awal bulan”.
- c. Akad yang dihubungkan dengan syarat merupakan akad yang dihubungkan dengan urusan lain dengan satu syarat, misalnya:“Jika kamu berpergian nanti kamu menjadi waktu” .

**4. Akibat hukum akad**

Menurut Ulama fiqih, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik seperti dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-



hal yang dibenarkan syarak, seperti terdapat cacatan pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.<sup>32</sup>

## **B. Al-Ijarah/ Upah-Mengupah Dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian dan dasar hukum upah**

#### **a. Pengertian upah**

Upah menurut istilah Terminologi, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>33</sup>

Salah Satu kegiatan manusia dalam kehidupan di lapangan muamalah yaitu salah satunya *Ijarah*. Secara Etimologi, *Ijarah* adalah bearti “Upah” atau “Ganti” atau “Imbalan”.<sup>1</sup>Upah dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah berkerja dan kewajiban orang yang memperkerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seseorang buruh sebagai atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberian kerja wajib pembayarannya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>TinjauanUmumTentangHukumAkadDalam Islam (On-line), tersedia di <http://internet.com.id/htm> (24 September 2019)

<sup>33</sup>H.A.Khamedi Ja'far,*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung:IAIN Raden Intan Lampung)<sup>23</sup>Helmi Karim,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1997),h.29

<sup>23</sup> M.Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah”, Jurnal Al-Adalah, vol 14 No 2 2017, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,2016), h.484. (online), tersedia di

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (mu'ajjir) oleh orang yang menyewa (musta'jir), serta pemilikan harta dari pihak musta'jir oleh seorang mu'ajjir. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompetensi tertentu pula.<sup>35</sup>

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atau jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayar kepada pekerja atau jasanya dalam bidang produksi atau factor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atau jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghimpunannya bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadaailan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan hukum Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah bendanya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. karena yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.

---

[http://ejournal.radenintan.ac.id/Index.php/adalah/article/view/1909\\_02](http://ejournal.radenintan.ac.id/Index.php/adalah/article/view/1909_02) Agustus 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

<sup>24</sup> Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti,1996),h.81

Hal dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah pembayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gaharar* (ketidak pastian atau penipuan), *Maysir* (Pejudian), *Riba* (Bunga Bank), *Zhulm* (Penganiyaan), *Risywah* (Suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan disebut dengan akad. Dengan akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipehuni tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa akad adalah sarana sosial yang ada dan sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).<sup>36</sup>

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undang dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang

---

<sup>36</sup> Hendri Sehendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.114

tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat hukum.<sup>37</sup>

*Ijarah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun *ijarah* kadang-kadang akad *Ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Upah juga dapat memegang peranan penting yang merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan upah dapat dikatakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum yang lain. Jadi, upah adalah imbalan yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak

---

<sup>37</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.4

<sup>38</sup> M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), h.180

yang melakukan pekerjaan.<sup>39</sup> Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan terakhir pada hubungan kerja putus.

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Jadi, upah adalah suatu imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.<sup>40</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Ada beberapa definisi *Al-Ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama Fiqih:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: “*Ijarah* yaitu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar)”.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> UU republik No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>40</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.15

<sup>41</sup> Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah* Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), h.94



- b. Para Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa "*Ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai penganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan (jelas).<sup>42</sup>
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- d. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan pengantian yang jelas pula.

Definisi *Ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama sebelumnya yang intinya adalah transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *Ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompesensasi/upah). Akad *Al-Ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad al-*ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akan al-*ijarah* hanya ditunjukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh diajdikan sebagai

---

objek *Al-Ijarah* untuk diambil susunya atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga dapat perbedaan makna operasional, sewa bisa digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan digunakan untuk tenaga, jadi dipahami bahwa *Al-Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.

## **b. Dasar hukum upah**

### **a. Al-quran**

Al-quran secara hanafiyah berarti bacaan: adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah SWT. Hampir semua ulama fiqh bersepakat bahwa *Ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abū Bkr AL-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *Ijarah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي

ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ

عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): “Berkatakan dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu seseorang dan kedua anakku ini,atas dasar bahwa Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak cukupkan sepuluh tahun kamu, dan kamu insya allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik.” (Q.S Al-Qashash (28):27).<sup>43</sup>

1. Surat Al-baqarah ayat 233 disebutkan

---

<sup>43</sup>Prof.H.Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*, (Jakarta:PT:Alma'arif 1989),h.352

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ<sup>ط</sup> لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرِّضَاعَةَ<sup>ج</sup> وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup> لَا تُكَلَّفُ

نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ج</sup> لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ<sup>ج</sup>

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>ط</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا



“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita

*kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>44</sup>*

Ayat diatas menejelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan fan perjanjian maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaklah tidak berbuat curang terhadap pemberian upah. Upah dapat berupa jumlahnya apabila telah disepakati bersama anantara kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.

## 2. Al-Qur'an surat An-nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً

طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

---

<sup>44</sup>Ibid, h. 46.



*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.”<sup>45</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan baalan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha atau perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaanya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan didunia maupun diakhirat.<sup>46</sup>

b. Hadist

Hadis adalah perkataaan (sabda), perbuatan ketetapan dan persetujuan dari nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadist dijadikan ssumber hukum Islam selain Al-quran. Dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-quran.

Selain itu ayat Al-Qur'an diatas, adaa beberapa hadis yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan:

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemah, (Semarang: CV As-syifa, 2001), h.740.

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Quran ), Jakarta: Lentera Hati, cet.II, 2009, h.601.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اعْطُوا الْاَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ما

جه) <sup>٤٧</sup>

*“Dari abdilah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW :  
Beerikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum  
keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah, Sahih).*

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi Ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan beberapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadist riwayat Sa'id Al-Khudri Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرَّاجِيْرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهْ. (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

*“Dari abu Said Al-khudri ra. Bahwasanya nabi SAW  
bersabda: barang siapa yang memperkerjakan pekerja maka  
tentukanlah upahnya. (H.R Abdurrazaq)”*

---

<sup>47</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Maron Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta : Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th), h.188.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْرًا حُجَامٍ فَقَالَ: اجْتَنِمَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَخَّمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَا عَيْنٍ مَنْ

طَعَامٍ. (رَوَاهُ ابْنُ خَرِّشٍ)<sup>٤٨</sup>

*“Abu hurairoh ra, berkata Rasulullah SAW, bersabda “  
tiga golongan yang aku musuhi kelak dihari kiamat ialah:  
seseorang yang memberi perjanjian dengan naamaku  
kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang yang  
merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang  
memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik  
namun ia tidak memenuhi upahnya.”9H.R. Muslim)”*

## **2.Rukun dan Syarat Upah (Ijarah)**

### **a. Rukun Upah (Ijarah)**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>49</sup>

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan ada pun sewa

<sup>48</sup> *Ibid*, h.189.

<sup>49</sup> Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2007),h.303

menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.<sup>50</sup>

Jadi menurut Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu *Ijab* dan *qabul*. Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Adapun menurut Jumhur Ulama Rukun *Ijarah* ada (4) empat, yaitu:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

*Mu'ajir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'ajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu (buruh/pekerja).<sup>51</sup> Persyaratan orang yang berakad untuk kedua belah

---

<sup>50</sup> Chairuman Pasaribu Surwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), h. 53

<sup>51</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-1, (Bogor: Grialia Indonesia), h. 170

pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal, saling meridhai dan dapat membedakan. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika salah seseorang berakad itu gila atau anak kecil menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), maka akad menjadi tidak sah.

b. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad(*sighat- 'aqad*), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui, ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab qabul pada jual beli hanya saja dalam *Ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>52</sup>

c. *Ujrah/Upah*

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'ajjir. Dengan syarat hendaknya.

d. *Manfaat*

Untuk mengontrak seseorang musta'jir harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.<sup>53</sup>

1. Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang

---

<sup>52</sup> Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Islam Terang 2005), h. 178.

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Figh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.231.



Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHpd, setiap perjanjian selalu memiliki empat unsur yang melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

a. Persetujuan kehendak

Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (ijab qabul) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak lazim. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

b. Kewenangan

Unsur subjek atau kewenangan berbuat, setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat

akal (tidak gila. Tidak dibawah pengampuan dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

c. Objek (prestasi) tertentu

Unsur objek atau prestasi tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda gerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tidak tertentu. Suatu objek tertentu merupakan suatu objek perjanjian prestasi wajib dipenuhi.

c. Tujuan perjanjian

Unsur tujuan, yaitu apa yang dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.<sup>54</sup>

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang ditentukan diatas tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya, apabila dilaksanakan juga, samapai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakui dan menimbulkan sengketa. Apabila diajukan kepengadilan akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal

---

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h.299.

## **b. Syarat upah (*Ijarah*)**

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat-syarat sewa menyewa menurut hukum Islam yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian hakekat sewa menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *Al-Ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *Al-Ijarah* adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

### **1. Pelaku *Al-Ijarah* haruslah berakal**

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *Al-Ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *Ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki cakapan bertindak yang selaku perbuatan yang dilakukannya dapat disempurna, sehingga

---

<sup>55</sup> Ghufrani A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontesual*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal bersifat fisik dan kewajiban, segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu yang sah.



## 2. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Al-Ijarah*. Apabila salah seseorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

kepada firman Allah SWT dalam (Q.S. An-Nisa 4:29) yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan berjalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa 4: 29).<sup>56</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan

---

<sup>56</sup>Prof.H.Mahmud Junus, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan* ,(Jakarta: PT: Alma'arif 1989), h.76



jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur-unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

Akad tersebut menjelaskan bahwa diperintakan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapatkan dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

Akad sewa- menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-keduanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.<sup>57</sup>

### 3. Objek *Al-Ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadi sewa-menyewa atau pemburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh diatas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqih menyatakan bahwa “sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”.

### 4. Objek *Al-Ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *Al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqih sepakat

---

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h.232-233

menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

5. Objek Al-Ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui

jika perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

- a. Penjelasan tempat manfaat disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
- b. Penjelasan waktu menurut Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.
- c. Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
- d. Penjelasan waktu kerja adalah tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.<sup>58</sup>
- e. Pembayaran (uang) sewa seharusnya bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan

---

<sup>58</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 36-37

yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat-syarat *Ijarah* ada lima yaitu:

- a. Keleraan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
- b. Objek yang disewakan dapat diketahui manfaatnya.
- c. Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
- d. Benda yang disewakan dapat diserahkan.
- e. Kemanfaatkannya mubah bukan diharamkan

Apabila syarat *Ijarah* di atas telah dipenuhi, maka akad *Ijarah* telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mu'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang memberi, sedangkan *musta'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

### 3. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)

Didalam fiqh muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepanda (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepanda dengan kerjanya serta dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>59</sup>

Dilihat dari segi objeknya, akad Ijarah dibagi menjadi dua :

- 1) *Ijarah* manfaat ( *Al-Ijarah ala Al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *muta'jjir* butuh benda-benda tentu dan *muta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu'ajir mendapat imbalan tertentu dari *muta'jjir*, dan *muta'jjir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- 2) *Ijarah* bersifat pekerjaan (*Ijarah ala al-al'ma*) adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain,

---

<sup>59</sup> M.I Yusato dan MK Widjajakusua, *Menggagas Bisnis Islam*,(Jakarta:Gema Insani Press,2002),h.67

kemudian *muta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga ia keluarkan untuk *muta'jjir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.<sup>60</sup> *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu : <sup>61</sup>

a) *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja.

Hukum orang yang berkerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b) *Ijarah musytarik*, yaitu *Ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain.

Sebelum melakukan transaksi, perlu adanya perjanjian diantara para pihak agar transaksi dapat dilakukan dengan jelas. Adapun asas perjanjian dalam hukum Islam yaitu :<sup>62</sup>

1. Asas Ibadah (Mabda al-Ibadah)

Asas ini merupakan “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan

2. sampai kebebasan dalil yang melarang Berakad (Mabda' Huriyyah at-Ta'qud)

yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja

---

<sup>60</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2003,h.236

<sup>61</sup> Afzalur Rahman,*Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*,(Penerbit Dana Bakti Wakaf), h.361

<sup>62</sup> Syamsul Anwar,*Hukum perjanjian Syariah*,(Jakarta: Rajawali Press,2010),h.83-92



kedalam akad yang dibuat dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan yang batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.

3. Asas Konsensualisme ( Mabdu' ar-Radha'iyyah)

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

4. Asas keseimbangan (Mbada' at-Tawazun al-mu'wadhah)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perjanjian tersebut.

5. Asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh memberatkan (masyaqqah) atau menimbulkan kerugian (mudharat) diantara para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>63</sup>

6. Asas Amanah

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak

---

<sup>63</sup> Syaid Sabiq, *Fiqh sunnah 5*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.33

dibenarkan tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.

#### 4. Hak Menerima Upah

Hak Ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaanlain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam Al-Qur'an yang berkaitannya dengan penentuan upah di jumpai dalam Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl (16) ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran”.*<sup>64</sup>(Q.S An-Nahl (16): 90).

---

<sup>64</sup>Prof.H.Mahmud Junus,*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*,(Jakarta:PT:Alma'arif 1989),h.250

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat ditemukan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberian pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada perkerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai adil yang besar untuk kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk mensejahterakan para perkerjanya, termasuk dalam hal ini memberi upah yang layak.<sup>65</sup> Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

## 5. Sistem pengupahan

### a. Sistem pengupahan

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

---

<sup>65</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dasar Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 157.

Jika *musta'jir*. Ia berhak menerima baayaranya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaanya.<sup>66</sup>

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

- a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.



---

<sup>66</sup>*Ibid.*, .236.

Hak menerima upah bagin *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- b. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diIjarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Aazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat uupah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.<sup>67</sup>

Upah menurut profesor Benham, upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai dengan perjanjian.<sup>68</sup>

Upah mengupah atau Ijarah 'ala al-a'mal, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian,

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, h. 26

<sup>68</sup>Taqyudin An,Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,(Surabaya; Risalah Gusti, 1960), h.103.



membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yakni:<sup>69</sup>

- a. *Ijarah khusus*, yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upah. Contoh :heri mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja ditempat Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam arti kata lain Ijarah khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
- b. *Ijarah musytarik*, yaitu Ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama hukumnya dibolehkan krja sama dengan orang lain

#### B .Gugurnya Upah (*Ijarah*)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditanganya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditanganya, ia mendapat upah.

---

<sup>69</sup> Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 2, (Penerbit Dana Bakti Wakaf, 1989 ), h.361.

Ulama hanifiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut.<sup>70</sup>

- a. Jika benda ditangan ajir.
  1. Jika bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
  2. Jika tidak ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada ditangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

## **6. Hubungan kerja**

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum yang mengenai suatu perjanjian. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenagakerjaan.<sup>71</sup>

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, h. 133-134

<sup>71</sup>Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat kewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.<sup>72</sup>

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan, jadi perjanjian harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.<sup>73</sup>

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja (buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan.

## **7.Bentuk Upah**

Bentuk upah yang diterima pekerja umumnya dalam bentuk uang, tetapi dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang dimaksud upah adalah:

- 1) Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan

---

<sup>72</sup>Chairuman Pasaibu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994), h.56.

<sup>73</sup> Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 1994), h.168.

keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>74</sup>

- 2) Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan, dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian dalam suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, dan dibayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun keluarga.<sup>75</sup>



---

<sup>74</sup> Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

<sup>75</sup> Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981

### **BAB III**

#### **UPAH DI STASIUN KERETA API TANJUNG KARANG**

##### **A. Sejarah Stasiun Kereta Api Tanjung Karang**

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama jalan KA di desa Kemijen, Jum'at tanggal 17 juni 1870 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr.L.A.J Baron Sloet van de beelee. Pembangunan diprakarsai oleh Naamlooze Venootschaap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NV.NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 km) dengan lebar sepur 1435 mm.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen-Tanggung, yang kemudian pada tanggal 19 juni 1870 dapat menghubungkan kota Semarang-Sukarta (110 km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 km.

Selain Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914) bahkan tahun 1902 di Sulawesi juga telah dibangun KA sepanjang 47 Km antara Makassar-Takalar, yang pengoprasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1903, sisanya Ujung Pandang-Muros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi Jalan KA pontianak-Sambas (220 Km)

sudah diselesaikan. Demikian juga dipulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan studi pembangunan Jalur KA.

Sampai dengan tahun 1939, panjang Jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 Km, kurang lebih 901 Km raib, yang diperkirakan dibongkar selama pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA disana.

Jenis Jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar seputar 1.067 mm; 750 mm ( di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan trans kota. Jalan rel yang dibongkar selama pendudukan Jepang (1942-1943) sepanjang 473 Km, sedangkan jalan KA dibangun selama pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah-Cikara dan 220 Km antara Muaro-Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro-Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000 di antaranya adalah Romusha

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang bergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya DJawatan Kereta Api Indonesia (DKARI)



Semenjak pembuatan kereta api tersebut, pertumbuhan selanjutnya di wilayah Indonesia, khususnya di pulau Jawa semakin diperhatikan dan diperluas dengan motif yang sama. Pertumbuhan kereta api tersebut bukan saja dipelopori oleh pemerintahan Belanda tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan Belanda, misalnya di pulau Jawa seperti : SCS (Semarang Chirebon Stoom Maatschappi), SLS (Semarang Joan Stoom Train Maatschapp), KSM (Kendiri Semarang Stoom Train My), MSM (Malang Stoom Train My) dan lain-lain. Wilayah Sumatera khususnya bagian Utara, Perusahaan swasta Belanda DSM (Deli Spoorweir Maatschppi) membuka jaringan pertama di Sumatera Utara Lintas labuhan Medan sekitaran tanggal 17 Juli 1886 dengan motif yang sama yaitu mengangkat hasil perkebunan dari pedalaman kepelabuhan timur yaitu pelabuhan Belawan. Pada Dunia II pada masa pendudukan Jepang (1 Maret 1941 – 17 Agustus 1945) semua kereta api di Indonesia dibawah pendudukan Jepang, diubah namanya. Seperti di Jawa dinamakan Rikuyu Kyoku kemudian berubah dengan Tetsudo Kyoku yang berpusat di Bandung. Di Sumatera, perkeretaapian dibawah pemerintahan Angkatan Laut Jepang dengan nama Tetsudo Tao yang berpusat di Bukit tinggi. Status pekeretaapian di Sumatera mengalami proses yang agak berbeda dengan kereta api lainnya. Sesudah berakhirnya pendudukan Jepang, Kereta Api di Sumatera Utara menjadi perusahaan swasta Belanda diwilayah Republik Indonesia. Sementara itu berdasarkan surat perintah penguasaan militer Tanggal 6 Desember 1958 NV DSM, berada dibawah pengawasan militer dari komando T dan TI. Kemudian berdasarkan SK panglima T dan TI penguasaan militer tanggal 10 Desember 1957 Nomor Pan/KPTS-045/12/573 Juncto, radiogram

Kasad/Penguasa Militer Pusat tanggal 18 Desember 1957 Nomor 77.602/57 tentang pengambilan alih wewenang Bahar dari perusahaan milik Belanda, oleh penguasa militer daerah Sumatera Utara. Tanggal 14 Desember 1957 wewenang Bahar atas NV DSM kepada Panglima T dan TI, mulai 29 April 1963 berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1958 Juncto PP.41 Tahun 1959 dengan SK Menhub, tanggal 17 Januari 1963 Nomor 37/120 PT.Kereta Api (persero) Indonesia LA.DSM yang berpusat di Bandung, kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 DKA berubah menjadi PN PERJAN. Tahap-tahap perkembangan perkereta apian secara umum :

- a. Jaman Republik Indonesia (17 Agustus 1945 – 18 Desember 1948), September 1945 secara resmi lahirnya DKARI (Djawatan Kereta Api Republik Indonesia) yang berpusat di Bandung. Sementara pada waktu itu hanya meliputi Jawa, karena perkereta apian di Sumatera Utara berdiri sendiri.
- b. Pengesahan kedaulatan, Januari 1950 terjadi penggabungan antara DKARI dengan SS/VS (Staats Spoorweg/Verenigf Spoorweg Bedryf) yang dikuasai Belanda menjadi DKARIS (Djawatan Kereta Api Republik Indonesia Serikat). Setelah RIS menjadi Republik Indonesia DKARIS berubah menjadi DKA.
- c. Perusahaan Negara, Mei 1963 DKA berubah menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1963.
- d. Pengesahan Jawatan. Dengan PP Nomor 61/71, 15 September 1971 telah ditetapkan perubahan status PNKA menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)

- e. Perusahaan Umum. Dengan PP Nomor 57 Tahun 1993, tanggal 30 Oktober 1990 ditetapkan perubahan atas status Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA), berlaku mulai tanggal 30 Oktober 1990.
- f. Persero. Dengan PP Nomor 1998 ditetapkan bentuk dari PERUM menjadi Persero. Dalam rangka sebagai pelimpahan wewenang Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) diubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA), kantor pusat PERUMKA di Bandung.

## **B. Pelaksanaan Praktik Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung**

Kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang sudah menjadi rutinitas yang umum yang terjadi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung, yang mana para kuli angkut ada konsumen merupakan saling membutuhkan satu sama lain dalam bentuk hubungan bermuamalah yaitu mengenai sewa jasa angkut barang.

Para pengunjung Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung mengakui kalau bantuan kuli angkut untuk membawa barang bawaan mereka, sehingga dengan adanya kuli angkut barang di Stasiun Kereta Api Tanjung Bandar Lampung membantu konsumen stasiun.

Pelaksanaan praktik kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Bandar Lampung diawali dengan adanya permintaan konsumen yang meminta jasa untuk dibawakan barang belanjaan dari turunnya kereta sampai menuju tempat

yang telah ditentukan oleh konsumen, namun ada juga kuli angkut barang yang tanpa menawarkan jasa angkut barang tetapi langsung mengangkat barang-barang konsumen tanpa diawali dengan akad kesepakatan terhadap konsumen, setelah melakukan angkut barang konsumen, kuli angkut barang langsung meminta upah yang disebutkannya tanpa ada kesepakatan harga angkut barang konsumen, kuli angkut barang langsung meminta upah yang disebutkannya tanpa ada kesepakatan harga angkut barang terhadap konsumen. Hal ini ada konsumen yang menjadi tidak nyaman dengan adanya kuli tersebut, bahwasannya uang upah yang diminta kuli tersebut, bahwasannya uang upah yang diminta kuli biasanya tidak sesuai pekerjaan yang dilakukan. Harga upah angkut barang belanjaan tidak berdasarkan banyak dan sedikitnya barang belanjaan yang dibawakannya, akan tetapi kuli angkut barang meminta uang upah sesuai dengan kemauannya.

Penelitian dilaksanakan di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung, dengan cara wawancara terhadap konsumen dan kuli angkut barang yang ditemui di lokasi penelitian, dalam hal ini penelitian dilaksanakan di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung, pada hari Sabtu, Tanggal 5 Juli 2019. Bersumber dari konsumen pasar dan kuli angkut barang di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung.

Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya mayoritas pengunjung Stasiun telah mengetahui keberadaan kuli angkut barang yang sudah lama berada di

Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung. Menawarkan jasa untuk membawakan barang bawaan para pengunjung Stasiun.<sup>76</sup>

Mengenai praktik kuli angkut barang, apakah ada kesepakatan atau tidak akad sebelum terjadinya praktik angkut barang, terkadang ada beberapa oknum kuli angkut barang yang melalaikan hal tersebut.<sup>77</sup> Hal tersebut terkadang kuli angkut barang memaksa membawa barang bawaan, pemaksaan yang dilakukan oleh oknum kuli angkut barang ini sudah mendapatkan penolakan dari pengunjung Stasiun agar tidak membawakan barang.<sup>78</sup>

Pengupahan kuli angkut barang, upah yang diberikan sesuai dengan barang bawaan.<sup>79</sup> Terkadang memiliki jarak tempuh kuli tersebut mengantarkan barang bawaan dengan memberikan upah sepiasnya.<sup>80</sup>

Mengenai praktik pengupahan kuli angkut barang. Ada kesepakatan dalam menentukan harga yang akan diberikan pengunjung stasiun (konsumen) atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh kuli angkut barang. Hal ini dilakukan pekerjaannya, kesepakatan mengenai harga pemberian upah kuli umumnya di stasiun ini, sekitar Rp.5.000 sampai dengan Rp.15.000, sesuai dengan barang bawaan.<sup>81</sup> Namun ada beberapa kuli yang langsung harga terhadap besaran

---

<sup>76</sup> Wawancara, Siti (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

<sup>77</sup> Wawancara, Rofi (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

<sup>78</sup> Wawancara, Parni (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

<sup>79</sup> Wawancara, Karsi (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

<sup>80</sup> Wawancara, Rofi (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

<sup>81</sup> Wawancara, Dinda (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019



upahnya dalam membawakan barang.<sup>82</sup> Jika harga yang diharuskan diberikan itu tidak sesuai maka ada penawaran harga terlebih dahulu, apa bila tidak sesuai dengan pekerjaannya yang akan dilakukan.<sup>83</sup>

Terkadang ada oknum kuli angkut yang memaksakan mengenai harganya, pada saat barang sudah di angkut sampai ke tempat yang ditentukan, pengunjung dipaksa untuk membayar yang tidak sesuai dengan jumlah barang bawaan mereka, penolakan dari pengunjung stasiun membuat kuli kesal. Akhirnya pengunjung stasiun dengan terpaksa mengikuti apa keinginan kuli angkut tersebut.<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap konsumen-konsumen di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas pengunjung Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung mengetahui dengan adanya kuli angkut barang.
2. Praktik kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung, biasanya ada permintaan dari orang yang butuh langsung, akan tetapi ada juga kali yang tanpa ada pemberitahuan langsung main angkut tanpa ada suruhan
3. Praktik kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung membawa barang-barang bawaan ke tempat yang pemilik

---

<sup>82</sup> Wawancara, Parni (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

<sup>83</sup> Wawancara, Karsi (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

<sup>84</sup> Wawancara, Dinda (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019



barang. Biasanya kuli angkut barang membawakan barang-barang bawaan kendaraan pengunjung stasiun. Setelah sampai kendaraan langsung membayarkan upahnya.

4. Mengenai besaran upah itu tidak sesuai dengan terjadinya kesepakatan, menurut pengunjung stasiun, upah yang dibayar tergantung banyaknya barang dan jauh dekatnya jarak pengantaran barang.
5. Mengenai upah adakalanya kuli meminta yang sesuai keinginan tidak sesuai keinginannya tidak sesuai dengan pekerjaannya, tetapi pengunjung adakalanya yang menawarkan harganya jika upah terlalu mahal atau tinggi dan ada terpaksa memberinya sesuai permintaan kuli karena untuk menghindari perdebatan.

Hasil wawancara kepada kuli angkut barang di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung menyebutkan bahwasanya mayoritas kuli barang di Stasiun telah mengetahui tugas sebagai kuli angkut yaitu untuk membantu pengunjung stasiun dalam membawa barang bawaan ketempat yang dituju oleh pengunjung stasiun.<sup>85</sup>

Mengenai praktik kuli angkut barang yang terjadi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung, dengan membawakan barang bawaan para pengunjung stasiun, yang mana barang bawaan mereka lumayan cukup berat dan banyak.<sup>86</sup> Biasanya membawakan barangnya, atas

---

<sup>85</sup> Wawancara, Wawan (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

<sup>86</sup> Wawancara, Arif (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

permintaan pengunjung stasiun untuk membantu membawakan barang bawaan ketempat yang dituju oleh pengunjung stasiun.<sup>87</sup> Terkadang menawarkan jasa kepada pengunjung stasiun.<sup>88</sup> Tawaran ini muncul ketika melihat seorang pengunjung stasiun kesulitan membawa barang belanjaan, kuli sering menawarkan jasa untuk membawakan ketempat tujuan.<sup>89</sup>

Sebelum mengangkut barang kesepakatan ada kesepakatan terlebih dahulu, kemudian cara menentukan besar upah tidak ada ketentuan-ketentuan dalam menentukan harga, langsung kesepakatan dilapangan, apabila sesuai harga, langsung kesepakatan dilapangan, apa bila sesuai harganya sepakat barang langsung diangkat ketempat tujuan.<sup>90</sup>

Mengenai pengupahan kuli angkut barang pengunjung stasiun yang menawarkan upah yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa kuli angkut.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kuli angkut barang di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

---

<sup>87</sup> Wawancara, Hermawan (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

<sup>88</sup> Wawancara, Zainal (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

<sup>89</sup> Wawancara, Udin (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

<sup>90</sup> Wawancara, Topan (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

<sup>91</sup> Wawancara, Hamid (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar Lampung, 5 Juli 2019

1. Mayoritas kuli angkut barang telah mengetahui tugasnya, yaitu untuk membantu pengunjung dalam membawa barang-barang bawaan ketempat yang pengunjung arahkan.
2. Praktik kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung, biasanya ada permintaan dari orang yang butuh langsung, akan tetapi adakalanya menawarkan jasa angkut barang kepada pengunjung yang barang bawaan yang cukup banyak.
3. Praktik kuli angkut barang di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung membawakan barang-barang bawaan mereka ketempat yang pemilik barang. Biasanya kuli angkut barang membawakan barang-barang bawaan kendaraan pengunjung stasiun. Setelah samapi kendaraan langsung membayar upahnya.
4. Mengenai besaran upah itu tidak terjadi kesepakatan, menurut kuli angkut, upah yang dibayarkan tergantung banyaknya barang bawaan dan jauh dekatnya jarak pengantaran barang, tetapi pengunjung adakalanya yang menawarkan harganya tanpa memperhatikan kerja kuli angkut barang. Asal tawaran pengunjung stasiun sudah sebanding dengan kerja kuli angkut barang yang telah membawakan barang, maka yaa diambil saja.

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Praktik Sistem Upah Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung**

Upah merupakan suatu produsen suatu penetapan upah yang diambil oleh pengusaha dalam memberikan imbalan atas jasa pekerjaanya. Biasanya pengusaha melakukan pengupahan berdasarkan kebijakan yang dilakukan dari usaha-usaha tersebut. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Upah juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan pekerja yang bekerja di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung.

Peraturan pemerintah no tahun 1981 tentang perlindungan upah, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan dalam satu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemilik dan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Seperti yang dijelaskan dalam sistem pengupahan pekerja terdiri dari Peraturan pemerintah no tahun 1981 tentang perlindungan upah, upah adalah suatu

penenerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan dalam satu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemilik dan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Proses penentuan upah yang Islami berasal dari dua faktor objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah yang ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah berdasarkan Hadist “ Bayarlah upah sebelum keringat kering ”.

Berdasarkan hasil wawancara para kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung. Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk kerjasama antara pihak yang memberikan pekerjaan dengan buruh, karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di stasiun sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong. Adapun para pihak pekerja kuli angkut yang berakad dalam pembayaran upah ini para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik barang angkutan (*mu'ajir*)

dan buruh (*musta'jir*). Dimana pembayaran upah diberikan di akhir sesudah mengantarkan barang-barang bawaan dikerjakan. Pihak mu'ajir biasanya memberikan pembayaran kepada buruh secara penuh. Tentu saja model pembayaran seperti ini biasanya berdampak kurang maksimalnya seseorang buruh melakukan pekerjaan. Dikarenakan tidak adanya motivasi dalam bekerja karena pembayarannya yang telah diterima semua.

Para kuli angkut melakukan upah-mengupah dengan tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian kerja dilakukan secara lisan atau tidak adanya bukti perjanjian bahwa telah terjadi sesuatu akad perjanjian kerja di kedua belah pihak, upah mengupah juga dalam menyebutkan akad tidak jelas hak dan kewajiban si buruh.

Pada akad yang dilakukan kedua belah pihak ada perjanjian bahwa pihak *musta'jir* harus melakukan pekerjaannya dengan cara baik dan rapi. Dalam prakteknya di masyarakat pihak *musta'jir* tidak selalu melakukan pekerjaannya dengan baik dan rapi. Padahal diawal terdapat perjanjian bahwa hasil pekerjaan *musta'jir* (buruh) harus rapi dan baik, namun sebagian dari *mua'jir* (pemilik barang) merasa senang telah mempekerjakan *musta'jir* tersebut sehingga apabila terdapat pekerjaan lagi maka bisa memakai jasanya kembali, dengan begitu terjadi sesuatu akad yang telah saling menguntungkan satu sama lainnya.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung**



Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antara manusia dengan manusia lainnya dengan cara bermu'amalah. Prinsip dasar mu'amalah merupakan menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih mu'amalah yang semuanya merupakan hasil penggalan dari al-Qur'an dan Hadis.

Besar kecil upah yang harus diterima oleh pekerja dalam Islam, ditetapkan berdasarkan oleh kesepakatan antara pemilik barang dan buruh. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan suka sama suka, tidak merugikan salah satu pihak. Menurut hukum Islam, kerjasama ini dikategorikan dalam akad *al-ijarah ala al-a'mal* adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Musta'jir* merupakan orang yang mempunyai keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu, *musta'jir* mendapatkan upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *mua'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *musta'jir*.

Dalam fiqih mu'amalah, upah atau *Ijarah* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu, yang pertama upah yang telah disebutkan *ujrahal musammah*, dan kedua, upah yang sepadan *ujrah al misli*. Upah yang disebutkan *ujrah al-musammah* yang disyariatkan harus disertai kerelaan atau diterima adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi. Dengan

demikian pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari pada yang telah disepakati. Apabila upah tersebut disebutkan saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah *ajrun musammah*. Apabila belum disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan *ajrul misli*.

Sedangkan upah yang sepadan *ujrah al-misli* merupakan upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima pekerjaan pada saat transaksi pembelian jasa. Maka dengan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Adapun para pihak yang berakad dalam sistem upah kerja ini merupakan para pihak yang membentuk akad yaitu majikan yang baik pekerjaan dengan buruh yang membutuhkan pekerjaan.

Jadi yang menentukan upah tersebut adalah *ajrun musammah* yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian upah-mengupah disertai kerelaan di antara kedua belah pihak dengan dasar kerjasama atau gotong royong. Selain itu dengan sistem ini juga sistem pengupahan di akhir yang dilakukan buruh kuli angkut di stasiun adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat dan kebiasaan tersebut bisa menjadi hukum.

Islam membolehkan melakukan transaksi *Ijarah* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal, seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain.

Namun, tidak dibolehkan melakukan transaksi Ijarah untuk keahlian membuat minuman keras (*Khamar*), membuat narkoba dan obat-obat terlarang, atau segala aktivitas yang terkait dengan riba.

Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia. Baik muslim atau non muslim. Namun ada beberapa prinsip acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan mu'amalah ini. Salah satunya adalah mu'amalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan dalam mu'amalah tidak boleh merugikan diri sendiri atau satu sama lain. Persetujuan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk setiap akad. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qobul atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam juga tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.

Objek pembahasan fiqh muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal. Hakikat dari hubungan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Allah SWT menurunkan syariat (Hukum Islam) untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun disenangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu yang dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain. Islam tidak membatasi cara-cara tertentu berbeda-beda

menurut situasi dan pengaruh banyak faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaan, dan waktu yang diperlukan. Para ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor ini dengan upah yang sesuai dengan fitrah yang sehat dan adat kebiasaan yang baik sesuai dengan asas dalam Islam.

Tujuan di syariatkannya Al-Ijarah itu merupakan untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat berkerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya keduanya saling mendapatkan keuntungan, seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukannya. Dipihak lain ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi ijarah kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. Upah dan pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam Islam. Pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok manusia dalam sehari-hari yang harus dipenuhi. Tidak seseorang pun yang dapat melepaskan dari kedua kebutuhan. Oleh karena itu Islam menjadikan dua hal itu sebagai nafkah pokok yang harus di berikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam pemberian upah perlu di perhatikan apakah upah tersebut telah mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain itu faktor gaji dan upah ikut mempengaruhi baik tidaknya kinerja buruh. Upah sebagai salah satu komponen penting dalam upaya meningkatkan kerja buruh untuk menciptakan tujuan, sehingga pemberian upah yang layak dibagi buruh harus diperhatikan.

Perkiraan upah yang di tentukan sesuai dengan manfaat jasanya, di mana perkiraan jasanya tidak bersifat panen, melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali.

Syari'at Islam mengajurkan agar upah yaang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga kerja yang telah diberikan. Tidak diperbolehkan untuk menuntut seseorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar.

Pembayaran upah yang diterima pekerja kuli angkut yang tidak sesuai dengan perjanjiannya di awal akad, menyebabkan para kuli angkut itu hanya mendumel saja tidak berani mengatakan upah yang tidak sesuai. Dalam Al-Qur'an, dapat dipaparkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh pemilik barang bawaan di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung belum sesuai dengan hukum Islam karena adanya ketidakadilan dalam pemberian upah.

Menurut ulama *fiqih* setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal *syara'* seperti

terdapat cacat pada objek, akad itu tidak memenuhi salah satu *rukun* dan *syara'*. Jika akad itu tidak terdapat kesepakatan maka akad menjadi batal.





## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang terdahulu dapat disimpulkan:

1. Sistem upah pada buruh kuli angkut barang di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung dilakukan antara mu'ajir ( pemilik barang atau pengunjung ) dan musta'jir ( penerima upah atau kuli angkut ) berikan pada akhir pekerjaan sesuai dengan kesepakatan di awal. Adapun besaran biaya sekitar antara Rp.5.000 sampai dengan Rp.15.000 dilihat berdasarkan besar dan kecilnya barang.
2. Menurut hukum Islam, sistem jasa kuli angkut di stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung, dari segi rukun dan syarat telah sesuai memenuhi hukum Islam.

#### **B. Rekomendasi**

Setelah di melakukan penelitian dan pengamatan mengenai penerimaan upah di stasiun kereta api tanjung karang pusat bandar lampung, maka dapat diberikan saran-saran antara lain:

1. Kepada memiliki barang agar lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan secara langsung dalam setiap melakukan akad perjanjian kerja, terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih jelas melakukan akad perjanjian. Upah mengupah tersebut harus sesuai

dengan prinsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak akad dalam perjanjian dalam pekerjaan.

2. Kepada para buruh kuli angkut dalam menjalankan pekerjaan wajib bertanggung jawab dan memperhatikan kewajiban pekerjaannya hingga sampai tuntas, sehingga akad yang dilakukan tidak merugikan antara pemilik barang dengan para pekerja buruh kuli angkut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Junus, M.H.P. (1989). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*. Jakarta: PT Alma'arif

### B. Buku

Abdullah, S. S. (2000). *Fiqh Muamalah Cet ke 1*. Bogor: Grialia Indonesia.

Afandi, M. (1999). *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Al-Maraqhi, A. M. (1998). *Tafsir Al-Maraqhl*. Jakarta: Bahrin Abu Bakar.

An-Nabhan, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ash-Shaddieqy, T. (1992). *Pengantar Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shawi, A. A.-M. (2008). *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Assdiqy, M. (2002). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Riski.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.

Chairuman Pasar Ibu, S. K. (2004). *Perjanjian dasar Islam*. Jakarta: Sinar Grafik.

Djumadi. (2006). *Hukum Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT.raja Grafindo Persada

Hadi, S. (1981). *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Hakim, M. A. (2002). *Cara Praktis Memahami Konteksual Cet 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Mega Pratama.

Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Husni, L. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ja'far, H. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.

- Junus, P. (1989). *Al-Qur'an Al-Karim & Terjemahan*. Jakarta: PT.Alma'arif.
- Karim, H. (1997). *Fiqh Mua'malah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2013). *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moh.Saefulloh. (2005). *Fiqh Islam Lengkap*. 2005: Terbit Terang.
- Rahman, A. (2010). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rivai, V. (2011). *Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rozalinda. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syari'ah"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah 5 Cet 1*. Jakarta: Cakrawa Ia Publishing.
- Salim, P. S. (1991). *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Pustaka.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah Cet ke 6*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sumanto, M. M. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Sawah. *Al-adalah* , 484.
- Surwadi, C. P. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Widjajakusumo, M. Y. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

### **C. Peraturan Perundang-undang**

PeraturanPemerintahanNomor 8 Tahun 1981 tentang PerlindunganUpahPasal P1  
a

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 51.

### **D. Jurnal**

Sumanto Ahmad dan M.H.M, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah”, Jurnal Al-Adalah, vol 14 No 2 2017, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,2016), h.484. (online), tersedia di [http://ejournal.radenintan.ac.id/Index.php/adalah/article/view/1909\\_02](http://ejournal.radenintan.ac.id/Index.php/adalah/article/view/1909_02) Agustus 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

### **E. Wawancara**

Wawan ( Penerima upah atau kuli angkut di stasiun ), wawancara dengan penulisan, Bandar Lampung 5 Juli 2019

Arif ( Penerima upah atau kuli angkut di stasiun ), wawancara dengan penulisan, Bandar Lampung 5 Juli 2019

Hermawan ( Penerima upah atau kuli angkut di stasiun ), wawancara dengan penulisan, Bandar Lampung 5 Juli 2019

Topan ( Penerima upah atau kuli angkut di stasiun ), wawancara dengan penulisan, Bandar Lampung 5 Juli 2019

Zainal ( Penerima upah atau kuli angkut di stasiun), wawancara dengan penulisan, Bandar Lampung 5 Juli 2019

Hamid ( Penerima upah atau kuli angkut di stasiun), wawancara dengan penulisan, Bandar Lampung 5 Juli 2019

Siti ( Pemilik barang atau pengunjung di stasiun ), wawancara dengan penulisan, Bandarn Lampung 5 Juli 2019

Rofi ( Pemilik barang atau pengunjung di stasiun ), wawancara dengan penulisan, Bandarn Lampung 5 Juli 2019

Parni ( Pemilik barang atau pengunjung di stasiun ), wawancara dengan penulisan, Bandarn Lampung 5 Juli 2019

Karsi ( Pemilik barang atau pengunjung di stasiun ), wawancara dengan penulisan, Bandarn Lampung 5 Juli 2019

Dinda ( Pemilik barang atau pengunjung di stasiun ), wawancara dengan penulisan, Bandarn Lampung 5 Juli 2019

